BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Decision Usefulness Theory

Teori ini merupakan kerangka teori yang berguna untuk menentukkan tujuan dasar laporan keuangan. Berdasarkan Kerangka Konseptual Dewan Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis. Menurut Wang (2012, dalam Aladejebi dan Abiodun, 2019) Kegunaan keputusan didefinisikan dalam istilah relevansi, keandalan, keterbandingan, dan dapat dipahami. Teori ini diadopsi untuk memenuhi kebutuhan informasi investor dan kreditur. Laporan keuangan memainkan peran penting bagi berbagai pengguna yang terdiri dari kresitor, investor, karyawan, pelanggan, pemerintah dan instansi mereka dalam mengambil keputusan keuangan. Menurut Soyinka (2017) menyatakan bahwa kegunaan informasi akuntansi didasarkan pada faktor-faktor seperti ketepatan waktu, keandalan, relevansi, materialistis data akuntansi yang disajikan, dapat dimengerti, dapat diperbandingkan dan diverifikasi.

2.2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

2.2.1. Definisi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang telah berdiri sendiri dan dapat digunakan oleh entitas yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Secara eksplisit Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, sebuah entitas juga harus memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha entitas tersebut, dan antara usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya (SAK EMKM, 2018). Pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, namun dalam prakteknya pelaku UMKM kesulitan dalam menerapkan SAK ETAP. Kemudian pada tahun 2016 SAK EMKM mulai disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). SAK EMKM tersebut diharapkan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan (SAK EMKM, 2018). SAK EMKM

merupakan standar keuangan yang dibuat sederhana jika dibandingkan dengan SAK lainnya, karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh UMKM dan dasar pengukurannya menggunakan biaya historis (*historial cost*) yang mana sebuah UMKM hanya mencatat aset dan utangnya sebesar harga perolehan atau harga belinya (SAK EMKM, 2018).

2.2.2. Laporan Keuangan Entitas Berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan suatu entitas dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang nantinya akan bermanfaat bagi para pengguna dalam mengambil keputusan, misalnya saja laporan keuangan dapat membantu pihak entitas dalam mencari tambahan modal ke lembaga keuangan dan lembaga keuangan dapat melihat laporan keuangan entitas tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan apakah layak atau tidak mendapat pinjaman modal. Dalam penyajiannya pun laporan keuangan harus memiliki syarat tertentu dalam menyajikan informasinya seperti relevan, representasi tepat, keterbandingan, dan keterpahaman (SAK EMKM, 2018 : 7). Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) laporan keuangan minimum terdiri dari 3 unsur, yaitu : laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan (SAK EMKM, 2018 : 8).

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang akan menyajikan informasi mengenai aset, utang dan ekuitas dari suatu perusahaan pada akhir periode pelaporan. Berdasarkan SAK EMKM (2018 : 9) unsur-unsur tersebut disajikan Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas
b. Piutang
c. Persediaan
d. Aset tetap
e. Utang usaha
f. Utang bank
g. Ekuitas

Suatu entitas dapat menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM juga tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Walaupun demikian, entitas bisa menyajikan pos-pos dari kategori aset tersebut sesuai urutan likuiditasnya dan menyajikan pos-pos utang sesuai dengan urutan jatuh tempo pembayarannya (SAK EMKM, 2018 : 9).

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang akan menyajikan informasi mengenai pendapatan dan biaya dari suatu

entitas. Berdasarkan SAK EMKM (2018 : 11) laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan;
b. Beban keuangan;
c. Beban pajak.

Entitas dapat menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (SAK EMKM, 2018 : 11)

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berupa informasi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan memuat informasi sebagai berikut (SAK EMKM 2018 : 13) :

a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
a. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
b. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan

transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang akan disajikan pada catatan atas laporan keuangan tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

2.2.3. Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berikut langkah penerapan akuntansi laporan keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) (2018) :

1. Pengakuan Dalam Laporan Keuangan

   Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomi pada masa depannya dapat dipastikan mengalir kedalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Sebaliknya, aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya tidak mengalir dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Entitas membagi menjadi 2 jenis aset yaitu, aset lancar dan aset tidak lancar.

2. Pengukuran Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas dan setara kas yang diterima atau jumlah kas diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pekerjaan usaha normal.

3. Penyajian Laporan Keuangan

   Penyajian laporan keuangan menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai persyaratan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan antara lain: relevan; representasi tepat; dapat dibandingkan dan dapat dipahami dengan mudah.

4. Pengungkapan

   Pengungkapan adalah suatu bagian pertanggungjawaban dari pelaporan keuangan dan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan (Suwardjono, 2014:578). Ada dua jenis pengungkapan laporan keuangan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary*

disclosure) (Suwardjono, 2014:583). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku (Suwardjono, 2014:583). Laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yang lengkap berdasarkan SAK EMKM terdiri atas 3 laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2018:47).

2.3. Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi sangat diperlukan oleh pengelola usaha dalam menjalankan operasional perusahaan (Lohanda, 2017). Menurut Olatunji (2013), sistem akuntansi adalah sebuah skema yang teratur dan efisien untuk menyediakan informasi dan kendali keuangan yang akurat. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal pengambilan keputusan ekonomi dalam pengelolaan usaha kecil, termasuk keputusan pengembangan pasar, harga dan lain-lain (Mukoffi dan Sulistiyowati, 2019).

Zotorvie (2017) menyatakan bahwa UKM tidak melakukan pencatatan akuntansi dengan benar dalam usahanya. Alasan utama kegagalan dalam membuat catatan akuntansi yang tepat (laporan keuangan) adalah biaya tinggi untuk mempekerjakan akuntan yang

berkualitas dan kurangnya pengetahuan akuntansi di pihak beberapa pemilik/pengelola.

Mukoffi & Sulistiyowati (2019) menyatakan bahwa UMKM dapat melihat aspek positif yang akan mereka peroleh, yaitu dengan memiliki laporan keuangan mereka dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka, memfasilitasi perolehan keuangan bantuan dari bank atau lembaga kredit lainnya, dan menghindari sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Namun, penerapan akuntansi sulit dilakukan oleh UMKM karena pengetahuan akuntansi terbatas, kompleksitas proses akuntansi, dan asumsi bahwa laporan keuangan tidak penting bagi UMKM.

Aladejebi dan Oladimeji (2019) menyatakan bahwa para manajer memahami pentingnya pencatatan dan dampak positifnya terhadap menyimpan catatan yang tepat untuk mengetahui kinerja bisnisnya, namun mereka kurang memiliki pengetahuan akuntansi dan biaya yang tinggi untuk menyiapkan laporan keuangan menyita banyak waktu dan membutuhkan staff khusus.

Berdasarkan pendapat peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi adalah penguasaan seseorang dalam memahami proses akuntansi sampai disusunnya laporan keuangan.

2.4. Pelatihan Akuntansi

Pelatihan sebagai bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu relatif singkat dengan metode yang

lebih mengutamakan praktek daripada teori (Lohanda,2017).

Bokol *et al*., (2020) menyatakan bahwa pelatihan penyusunan laporan keuangan sangat penting bagi para pelaku penyusunan laporan keuangan karena berguna untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam penyajian laporan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Dalam mempelajari pengaruh pelatihan lembaga keuangan mikro dan kliennya, Karlan dan Valdivia (2011) dalam Olaolu dan Obaji (2020), menemukan perbaikan proses bisnis yang positif pada lembaga keuangan mikro dan klien UKM mereka yang telah menjalani pelatihan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan penyusunan laporan keuangan adalah usaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personal atau individu untuk mencapai keahlian dan kemampuan serta keterampilan yang ada agar berhasil guna dalam penyusunan laporan keuangan.

2.5. Komitmen Kerja

Menurut Mowday (1982, dalam Shaleh 2018) memberi pengertian komitmen kerja sebagai istilah dari komitmen organisasional. Komitmen organisasi adalah keyakinan yang kuat pada tujuan dan nilai organisasi, kesediaan untuk bekerja atas nama organisasi dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan organisasi (Carmon dkk ., 2010; Franco, 2017).

Menurut Curado dan Vieira (2019) Komitmen Organisasi adalah

topik yang dipelajari secara luas, dan sebagian besar definisi menggambarkan hubungan antara karyawan dan organisasi. Komitmen organisasi mengumpulkan tiga komponen: afektif, kelanjutan dan normatif. Komitmen organisasi afektif (AOC) menyangkut keterikatan emosional karyawan dan identifikasi dengan nilai-nilai organisasi. Karyawan yang kuat AOC memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan organisasi dan bersedia untuk fokus membantu organisasi mencapai tujuannya. Komitmen berkelanjutan (COC) mengacu pada identifikasi karyawan atas biaya yang dikeluarkan untuk keluar dari organisasi. Jadi, karyawan dengan COC yang kuat tetap berada dalam organisasi karena mereka tidak ingin mengeluarkan biaya tersebut. Komitmen organisasi normatif (NOC) adalah tanggung jawab dan kewajiban moral kepada tetap di organisasi. Karyawan dengan NOC yang kuat tetap berada di organisasi karena mereka merasa harus (Allen dan Meyer, 1990; Coetzee et al., 2014; Lewicka, 2015; Curado dan Vieira, 2019).

Hasil penelitian Ahmad dan Zabri (2015) menyatakan bahwa pemilik / manajer mungkin akan terlibat erat dalam pengelolaan perusahaan, komitmen pemilik / manajer perusahaan mungkin secara langsung mempengaruhi tingkat penggunaan Manajemen Praktik Akuntansi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen kerja merupakan daya loyalitas pekerja terhadap organisasi, jadi semakin

tinggi komitmen kerja akan berdampak pada hasil kerja yang lebih baik.

2.6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM. Menurut Mukoffi & Sulistiyowati (2019) UMKM merupakan kegiatan ekonomi paling banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah tulang punggung perekonomian Ghana dalam hal kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja (Abor & Quartey, 2010; Musah, 2017). UMKM ini bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (UU No. 20 Tahun 2008).

Tabel 2.1.

Data Perkembangan UMKM Indonesia Tahun 2018

No.	Indikator	Satuan	Jumlah	Pangsa(%)
1	Unit Usaha	Unit	64.194.057	99,99%
2	Tenaga Kerja	Orang	116.978.631	97,00%
3	Produk Domestik Bruto (PDB)	Rp Milyar	8.573.895,3	61,07%

Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi

dan ketenagakerjaan. Menurut Aladejebi & Oladimeji (2019) Secara global, UKM telah diakui memainkan peran penting dalam perekonomian negara maju dan negara berkembang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pada Bab I, Pasal 1 mengenai UMKM yaitu :

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anakn perusahaan atau cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah karyawan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.6.1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pada Bab IV pasal 6, kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
   a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
   a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bagunan tempat usaha; atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahuan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
   a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.6.2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab III Pasal 4 dan 5 mengenai prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut :

1) Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2) Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan Usaha Mkro, Kecil dan Menengah adalah :

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.6.3. Asas dan Tujuan Asas

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab II Pasal 2, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki 9 asas, antara lain :

a. Kekeluargaan

   Asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

b. Demokrasi ekonomi

   Asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

c. Kebersamaan

   Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan duni usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat.

d. Efisiensi berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

e. Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pembedayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

f. Berwawasan lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

g. Kemandirian

Asas kemandirian man tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.

h. Keseimbangan kemajuan

Asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

i. Kesatuan ekonomi nasional

Asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembanguan kesatuan ekonomi nasional.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pelatihan akuntansi, dan komitmen kerja terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	*Understanding of Accounting and Training for the Development of MSME's Financial Statements Based on Sak Emkm* Bokol et al., *(2020)*	Independen (X) X1 : *Understanding of Accounting* X2 : *Training on Financial Report Preparation* Dependen (Y) *MSME Financial Reporting Based on SAK EMKM*	Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan kajian SAK EMKM. Pelatihan penyusunan laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

2.	*An Assessment on the Influence of Entrepreneurial Training, Risk-Taking and Innovativeness on SMEs Development in Nigeria Olaolu & Obaji (2020)*	Independen (X) X1 : *Entrepreneurial Training* X2 : *Risk-Taking* X3 : *Innovativeness* Dependen (Y) *SME Development in Nigeria*	Pelatihan kewirausahaan dan inovasi signifikan untuk pengembangan dan kinerja UKM. Oleh karena itu, pelatihan kewirausahaan harus ditanggapi dengan serius oleh pelaku UKM karena pengalaman dunia bisnis lebih dari sekadar latihan akademis.Selanjutnya, para pelaku UKM harus mencari cara untuk berinovasi jika harus bertahan dengan keras dan kompetitif dalam lingkungan bisnis. Pemilik juga harus menghindari risiko yang tidak diperhitungkan, karena tidak semua risiko layak untuk diambil.
3.	*The Impact of Record Keeping on Performance on Selected Small and Medium Entreprises in Lagos Metropolis Aladejebi & Oladimeji (2019)*	Independen (X) *Accounting Record Keeping* Dependen (Y) *Firm Performance*	Para manajer memahami pentingnya pencatatan dan dampak positifnya terhadap menyimpan catatan yang tepat untuk mengetahui kinerja bisnisnya, namun mereka kurang memiliki pengetahuan akuntansi dan biaya yang tinggi untuk menyiapkan laporan keuangan menyita banyak waktu dan membutuhkan staff khusus.

4.	*Factors Affecting Use Of Accounting Records on Small and Micro Enterprises (The Case of Debre Birhan City, Ethiopia) Kahsay & Zeleke (2019)*	Independen (X) X1 : *Capital* X2 : *Education level of the manager* X3 : *Age of the firm* X4 : *Accounting Knowledge* X5 : *Training in Accounting Practice* X6 : *Access to Credit* Dependen (Y) *Accounting Records*	Modal usaha, tingkat pendidikan pemilik/manajer, lama usaha, pengetahuan akuntansi, pelatihan akuntansi, dan akses kredit berpengaruh positif terhadap penggunaan catatan akuntansi pada UMKM.
5.	*The Role of Financial Accounting Standards for Small And Medium Micro Economic Sectors: Case Studies In Lowokwaru District, Malang Mukoffi & Sulistiyowati (2019)*	Independen (X) *Accounting Knowledge* Dependen (Y) *Implementation of Accounting on MSMEs in Kecamatan Lowokwaru*	UMKM dapat melihat aspek positif yang akan mereka peroleh, yaitu dengan memiliki laporan keuangan mereka dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka, memfasilitasi perolehan keuangan bantuan dari bank atau lembaga kredit lainnya, dan menghindari sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Namun, penerapan akuntansi sulit dilakukan oleh UMKM karena pengetahuan akuntansi terbatas, kompleksitas proses akuntansi, dan asumsi bahwa laporan keuangan tidak penting bagi UMKM.

6.	*Trust, Knowledge Sharing and Organizational Commitment in SMEs Curado & Vieira (2019)*	Independen (X) X1 : *Trust* X2 : *Knowledge Sharing* X3 : *Organizational Commitment* Dependen (Y) *Performance SMEs in Potugis*	Kepercayaan, Pengetahuan dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UKM di Portugis.
7.	*A Study of Financial Accounting Practices of Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Ho Municipalit, Ghana Zotorvie (2017)*	Independen (X) *Accounting records* Dependen (Y) *Performance SMEs in Ho Municipalit, Ghana*	UKM tidak melakukan pencatatan akuntansi dengan benar dalam usahanya. Alasan utama kegagalan dalam membuat catatan akuntansi yang tepat (laporan keuangan) adalah biaya tinggi untuk mempekerjakan akuntan yang berkualitas dan kurangnya pengetahuan akuntansi di pihak beberapa pemilik/pengelola.
8.	*Organizational commitment in family SMEs and its influence on contextual performance Franco (2017)*	Independen (X) *Organizational Commitment* Dependen (Y) *Employees Contextual Performance in Small and Medium-Sized Family Enterprises (FSMEs)*	Dalam Usaha Keluarga Kecil Menengah (FSME), komitmen afektif memiliki pengaruh positif terhadap kinerja kontekstual, karena karyawan di segmen perusahaan ini memiliki hubungan emosional dikonteks tempat mereka berada.

9.	*Benefits and Challenges of Bookkeeping and Accounting Practices of SMEs and Its Effect on Growth and Performance in Ghana* *Musah (2017)*	Independen (X) *Bookkeeping and Accounting Practices* Dependen (Y) *Growth of the SMEs and Performance*	Pemilik / pengelola UKM memiliki sikap positif terhadap pembukuan dan pencatatan akuntansi tetapi kurang memadai pengetahuan akuntansi dan tidak adanya pedoman khusus untuk pembukuan dan pencatatan akuntansi, takut putus asa jika terjadi kerugian, tidak memadai pendidikan dan pelatihan keterampilan, dan kendala biaya dan waktu. Akhirnya, hasil menunjukkan hubungan positif antara praktik pembukuan dan pertumbuhan dan kinerja UKM di Ghana.
10.	*Micro Businesses : Do They Need Accounting ? Ramli et al., (2017)*	Independen (X) X1 : *Age of the Firm* X2 : *Accounting Knowledge* Dependen (Y) *Use of Accounting Information on Micro Enterprises (MEs)*	Lama usaha tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi, sedangkan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.

11.	*Interrelated Factors Influencing The Adoption of Accounting Information System Application by SMEs in Jordan Al-dmour et al., (2016)*	Independen (X) X1 : *Firm Size* X2 : *CEO Knowledge* X3 : *Government Rules and Regulations* X4 : *Competitive Pressure* X5 : *Financial Capabilities* X6 : *Top Management Support & Commitments* X7 : *Organization Structure* X8 : *Human Resource* X9 : *Organizational Culture: Willingness to Adopt New Technology* Dependen (Y) *Adoption of Accounting Information System Application by SMEs in Jordan*	Ukuran usaha, pengetahuan manajer/pemilik, peraturan pemerintah, tekanan kompetitif, kemampuan keuangan, dan dukungan serta komitmen pemilik/manajer berpengaruh positif terhadap adopsi SIA pada UMKM, sedangkan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan keinginan untuk mengadopsi teknologi baru tidak berpengaruh positif terhadap adopsi SIA pada UMKM di Jordan.
12.	*Factors Explaining The Use of Management Accounting Practices in Malaysian Medium-Sized Firms Ahmad & Zabri (2015)*	Independen (X) X1 : *Size of The Firm* X2 : *Intensity of Mark Competition* X3 : *Commitment of Owner/Manager* X4 : *Advanced Manufacturing Technology* Dependen (Y) *Management Accounting Practices*	Ukuran perusahaan, intensitas persaingan pasar, komitmen pemilik / manajer perusahaan dan kemajuan teknologi manufaktur berpengaruh positif terhadap praktik akuntansi manajemen pada UKM di Malaysia.

Sumber Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pelatihan akuntansi dan komitmen organisasi terhadap penyusunan laporan keuangan umkm berdasarkan sak emkm menunjukkan hasil yang beragam sehingga dapat menimbulkan *research gap* yang membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali pengaruh pemahaman akuntansi, pelatihan akuntansi dan komitmen organisasi terhadap penyusunan laporan keuangan umkm berdasarkan sak emkm.

2.8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang ada, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, maka kerangka pemikiran yang digunakan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

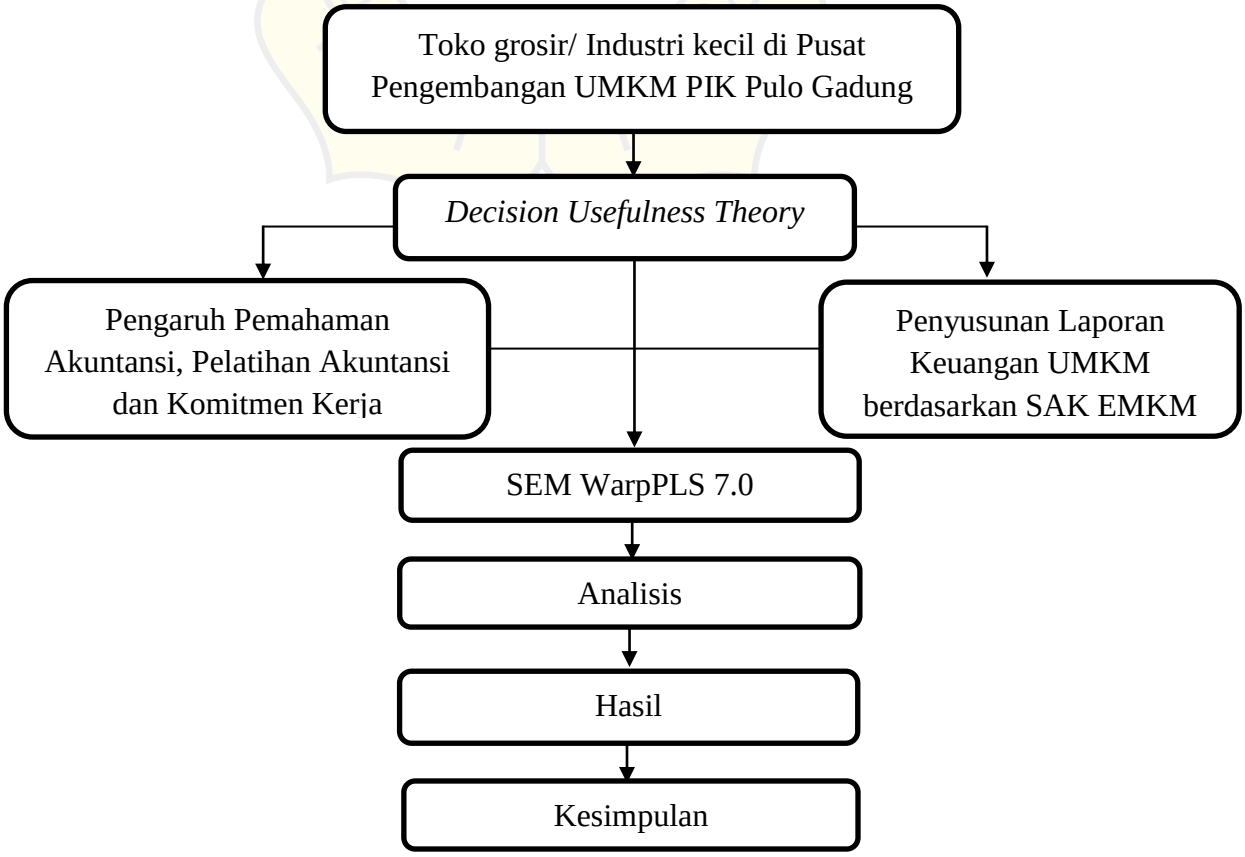

2.9. Model Konseptual

Gambar 2.2

Model Konseptual

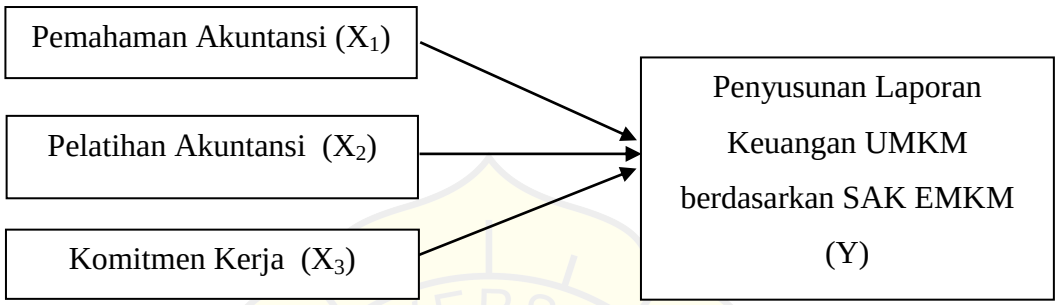

Keterangan :

X1 : Pemahaman Akuntansi

X2 : Pelatihan Akuntansi

X3 : Komitmen Kerja

Y : Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM

Kerangka konseptual ini untuk menunjukan arah penyusunan dari metodelogi penelitian dan mempermudah dalam pemahaman dan menganalisis masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Akuntansi dan Komitmen Kerja terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

2.10. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sekaran dan Bougie, 2017). Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. **Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM**

   Menurut Bokol *et al*., (2020) pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM masih kurang karena pemahaman akutansi dan juga sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah dan lembaga yang membawahi UMKM masih belum maksimal. Sedangkan menurut Kahsay & Zeleke (2019), dalam hasil penelitiannya diungkapkan bahwa UMKM tidak memiliki catatan akuntansi dengan benar karena kurangnya pengetahuan akuntansi, rendahnya tingkat pendidikan, usia usahanya yang masih muda, dan ketidakmampuan pemilik UMKM untuk menyewa seorang akuntan profesional. Menurut Ramli *et al*., (2017) Pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hasil penelitian Zotorvie (2017) Alasan utama kegagalan entitas untuk memelihara catatan akuntansi yang tepat adalah biaya yang tinggi untuk mempekerjakan akuntan yang memenuhi syarat dan kurangnya

pengetahuan akuntansi di pihak beberapa manajer-pemilik. Aladejebi dan Oladimeji (2019) dalam penelitiannya menyatakan UMKM tidak menyimpan catatan akuntansi dengan benar dikarenakan kurangnya pengetahuan akuntansi yang memadai.

H1: Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

2. Pengaruh Pelatihan Akuntansi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM

Menurut Bokol *et al*., (2020) menyatakan bahwa pelatihan penyusunan laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Hasil penelitian Olaolu dan Obaji (2020) menyatakan pelatihan kewirausahaan dan inovasi signifikan untuk pengembangan dan kinerja UKM. Pemilik / pengelola UKM di Ghana memiliki sikap positif terhadap pembukuan dan pencatatan akuntansi tetapi pendidikan dan pelatihan keterampilan tidak memadai (Musah, 2017).

H2: Pelatihan Akuntansi berpengaruh terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

3. Pengaruh Komitmen Kerja terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

Curado dan Vieira (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja UKM di Portugis. Hasil penelitian Al-dmour *et al*., (2016) menyatakan bahwa komitmen pemilik/manajer UKM

berpengaruh positif terhadap adopsi SIA pada UMKM di Jordan , serta hasil penelitian Ahmad dan Zabri. (2015) yang juga menyatakan Komitmen pemilik/manajer berpengaruh positif signifikan terhadap praktik akuntansi di Malaysia..

H3: Komitmen Kerja berpengaruh terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.